

**ANALISIS *FRAMING*: PEMBERITAAN MEDIA MASSA
MENGENAI KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM
MENANGGAPI RIVALITAS AMERIKA SERIKAT DAN CHINA
(2019-2022)**

Jessica Martha, M.I.Pol.¹, Adrianus Harsawaskita, MA.², Idil Syawfi, M.Si³,
Valeria Tania Margono⁴

¹²³⁴Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Katolik Parahyangan

¹jessica.martha@unpar.ac.id, ²adri@unpar.ac.id, ³idil.syawfi@unpar.ac.id,
⁴6091901052@student.unpar.ac.id

Abstract

In the second period of President Joko Widodo's government, Indonesia strengthened its cooperative relations with the United States and China through various agreements in the economy and other global issues. Indonesia's decision is influenced by many factors, both internal and external. According to Michael Brecher, in the process of foreign policy formulation, the mass media have a role to convey and advocate for the general public regarding the government's stance towards certain issues. Through this research, the research team wanted to find out whether the mass media in Indonesia support Indonesia's foreign policy in responding to the rivalry between the United States and China? To answer this question, the research team used the foreign policy formulation system (Michael Brecher) and the framing analysis (Robert N. Entman). The study was carried out on 15 selected news stories from Kompas, The Jakarta Post, and Tempo. Based on the research conducted, the research team concludes that the news conveyed by the mass media in Indonesia shows their support for Indonesia's foreign policy, especially its neutral stance in the rivalry between the United States and China.

Keywords: *Indonesian Foreign Policy; US-China Rivalry; Framing Analysis; Mass Media*

PENDAHULUAN

Secara konseptual, kebijakan luar negeri dipahami sebagai tindakan otoritatif yang dilakukan oleh negara dalam rangka mempertahankan aspek yang diinginkan atau mengubah yang tidak diinginkan. Tindakan tersebut, baik bersifat eksplisit maupun implisit, dilakukan untuk memenuhi kepentingan nasional dalam ruang lingkup internasional (Amstutz, 1998). Artinya, setiap keputusan ataupun tindakan yang dilakukan negara akan

berkaitan pula dengan faktor eksternal lain di luar batas wilayahnya, baik negara ataupun aktor non-negara. Tidak hanya itu, faktor internal, seperti perubahan rezim, perubahan orientasi pemerintah, keterlibatan aktor domestik, dan cara kerja sistem politik pun ikut mempengaruhi kebijakan luar negeri.

Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia mengedepankan prinsip luar negeri bebas aktif, dimana Indonesia tetap berperan aktif meskipun tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Prinsip luar negeri bebas aktif menjadi identitas khusus yang melekat pada Indonesia ketika membangun hubungan dengan negara lainnya. Maka dari itu, meskipun terjadi perubahan kepemimpinan, politik luar negeri bebas aktif dipastikan tetap menjadi salah satu prinsip yang dijalankan, termasuk ketika Joko Widodo terpilih menjadi presiden pada periode 2014-2019. Presiden Jokowi mengusung diplomasi kekuatan menengah (*middle power diplomacy*) "...yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, dengan memberi prioritas pada permasalahan yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia." (Seknas, 2014).

Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, terdapat lima prioritas kerja, yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, pemangkasan kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi dan transformasi ekonomi (Kemlu RI, 2020). Sejalan dengan lima prioritas tersebut, Kementerian Luar Negeri dalam Rencana Strategis 2020-2024, menyatakan bahwa arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia pun berpusat pada penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, meningkatkan kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia, serta memperkuat infrastruktur diplomasi. Dengan kata lain, pada periode keduanya, pemerintahan Jokowi pun tetap berfokus pada pemenuhan kepentingan nasional dengan menguatkan perekonomian dan melindungi kepentingan warga negara dan kedaulatan bangsa. Namun, upaya tersebut tetap disertai dengan keaktifan Indonesia di tingkat kawasan dan internasional dengan memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif,

termasuk dalam menghadapi konflik atau rivalitas yang terjadi antarnegara, salah satunya hubungan konfliktual antara Amerika Serikat dan China.

Secara praktik, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan China terjalin kuat sejak dulu. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, melalui *Strategic Partnership* pada tahun 2015, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk memperluas dan meningkatkan kerjasama dalam enam bidang kerja sama, antara lain kerja sama maritim, pertahanan, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, energi, kerja sama dalam masalah global dan regional, serta *people to people contact*. Sementara itu, *Indonesia-China Comprehensive Strategic Partnership* pun telah memperkuat hubungan bilateral kedua negara. China telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia. China juga menjadi investor asing terbesar ketiga di Indonesia (Kemlu RI, 2019). Bagi Indonesia, hubungan baik dengan Amerika Serikat dan China menjadi hal penting yang perlu dipertahankan.

Namun, beberapa pihak menekan Indonesia untuk menentukan sikap dalam menghadapi rivalitas Amerika Serikat dan China. Jika merujuk pada kebijakan luar negeri Indonesia di era pemerintahan Joko Widodo (2019-2024), tidak ada pernyataan lugas apakah Indonesia akan berpihak pada Amerika Serikat atau China. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin terjebak dalam persaingan Amerika Serikat dan China. Sebaliknya, Indonesia ingin menjadi mitra bagi semua negara, termasuk Amerika Serikat dan China (Allard & Stanley, 2020). Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak berpihak pada Amerika Serikat atau China. Indonesia akan tetap menjalin hubungan baik dengan kedua negara demi terwujudnya kepentingan nasional. Tentunya, keputusan itu pun akan berpengaruh pada kebijakan, aktivitas, dan hubungan Indonesia dengan negara lainnya.

Keputusan Indonesia untuk tidak berpihak pada Amerika Serikat atau China tentu dibuat dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Menurut Michael Brecher (1969), terdapat tiga tahapan dalam sistem penyusunan

kebijakan luar negeri, yaitu *input*, proses, dan *output*. Dalam setiap tahap, terdapat sejumlah faktor yang berperan, salah satunya adalah media massa. Brecher menegaskan bahwa media massa berperan dalam menyampaikan dan mengadvokasi masyarakat, baik dalam ataupun luar negeri, mengenai sikap pemerintah terhadap isu tertentu. Media massa juga bisa membantu pemerintah menyampaikan kebijakan luar negerinya, termasuk meminta dukungan masyarakat ataupun pihak-pihak lainnya. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini, tim peneliti ingin mengetahui apakah media massa di Indonesia mendukung Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam menanggapi rivalitas Amerika Serikat dan China?

Penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, penelitian ini mencoba melihat kebijakan luar negeri Indonesia dari sisi lain, yaitu keterlibatan media massa. Sebelumnya, tim peneliti belum pernah menemukan literatur yang mendalami peran media massa dan pemberitaannya dalam praktik kebijakan luar negeri di Indonesia. Kedua, tim peneliti melakukan analisis *framing* untuk mengetahui pemberitaan media massa di Indonesia terkait rivalitas Amerika Serikat dan China. Ketiga, penelitian ini pun berupaya menjelaskan bahwa media massa memiliki peran signifikan dalam praktik kebijakan luar negeri di setiap negara, termasuk Indonesia.

Kerangka Analisis

Pendekatan Sistem dalam Penyusunan Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan serangkaian rencana, komitmen, dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ketika berhubungan dengan aktor lain di lingkungan eksternal (Rosenau, 1974). Menurut Michael Brecher (1969), terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi proses penyusunan kebijakan luar negeri. Faktor-faktor tersebut dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap *input*, proses, dan *output*.

Tahap input terdiri dari lingkungan operasional (*operational environment*), komunikasi (*communication*), dan lingkungan psikologis (*psychological environment*). Lingkungan operasional dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal ketika kebijakan luar negeri dibuat.

Graber (1984), terdapat empat fungsi media massa, antara lain menyediakan informasi terbaru tentang berbagai peristiwa politik yang sedang berkembang sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, memberikan ruang kesadaran sosial bagi berkembangnya opini publik di masyarakat, memfasilitasi negara dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat, dan memberikan kesempatan pada para penyelenggara pemerintahan untuk memelihara keberlanjutan kekuasaannya. Sejalan dengan Graber, Suwardi (2004) menyebutkan bahwa sejumlah aspek yang dimiliki media massa pun membuat perannya menjadi semakin penting dalam kehidupan bernegara. Aspek pertama, daya jangkauannya sangat luas sehingga membantu penyelenggara pemerintah untuk menyebarkan informasi. Kedua, kemampuan *multiplier of message* yang dimiliki media massa dapat menimbulkan dampak yang besar di tengah masyarakat. Ketiga, kebijakan redaksional media massa mampu mewacanakan peristiwa atau informasi tertentu sesuai dengan pandangannya. Berikutnya, fungsi *agenda setting* yang dapat membentuk sebuah peristiwa menjadi agenda publik. Kelima, kemampuan media massa dalam membentuk “rantai informasi” sehingga informasi dapat disebar dengan cepat dan berdampak luas bagi seluruh masyarakat.

Seluruh fungsi dan peranan media massa dalam kehidupan bermasyarakat sangat dipengaruhi oleh agenda setting dan framing. Menurut McCombs dan Shaw (2011), media massa memiliki kemampuan untuk menentukan isu yang sebaiknya menjadi fokus perhatian publik. Media massa tidak mencerminkan realita. Sebaliknya, media massa menyaring dan membentuk realita tersebut sehingga publik menganggap isu tertentu lebih penting dibandingkan isu-isu lainnya. Kemudian, kemampuan *agenda setting* yang dimiliki oleh media massa didukung pula oleh *framing*, yaitu kemampuan media massa untuk menentukan bagaimana cara publik “memikirkan” dan “memaknai” suatu peristiwa. Artinya, media massa tidak hanya menetapkan peristiwa yang penting bagi masyarakat, tetapi media massa juga ikut memengaruhi cara memproses informasi yang diterimanya.

Menurut Brecher (1969), dalam sistem penyusunan kebijakan luar negeri, media massa dan jurnalis dikategorikan sebagai *nonassociational interest groups*, yaitu kelompok kepentingan yang memiliki kemampuan untuk mengadvokasi kebijakan luar negeri. Kemampuan tersebut nantinya dapat memengaruhi proses penyusunan kebijakan luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, media massa juga berperan dalam penyampaian informasi terkait kebijakan luar negeri kepada masyarakat di dalam ataupun luar negara tersebut. Jika merujuk pada diagram 1, media massa berada di antara tahap *input* dan *output* yang melibatkan beberapa instrumen penting dalam penyusunan kebijakan luar negeri. Selain itu, setelah proses penyusunan kebijakan luar negeri selesai, media massa juga berperan untuk menunjukkan implementasi kebijakan luar negeri kepada masyarakat, pemerintah, dan negara-negara lainnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena yang terbangun dari interaksi sosial. Creswell (2008) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sangat bergantung pada informasi yang diperoleh dari objek/partisipan pada ruang lingkup yang luas, pertanyaan yang bersifat umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri atas kata-kata/teks dari partisipan, menjelaskan dan melakukan analisa terhadap kata-kata dan melakukan penelitian secara subyektif. Untuk menjawab pertanyaan penelitian, tim peneliti menggunakan teknik analisis dokumen. Menurut Bowen (2009), analisis dokumen merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen, baik cetak maupun elektronik, guna mendapatkan makna, pemahaman, dan pengembangan pengetahuan empiris. Adapun beberapa dokumen yang dikumpulkan tim peneliti, antara lain laporan kerja pemerintah, berita dari berbagai media online di Indonesia, dan dokumen pendukung lainnya.

Secara khusus, tim peneliti menggunakan teknik analisis *framing* Entman (1993) untuk menganalisis berbagai berita yang berkaitan topik

penelitian. Analisis *framing* mengacu pada teknik membingkai dan mengkonstruksikan berbagai peristiwa dan informasi ke dalam berita. Dengan menggunakan teknik *framing*, media memusatkan perhatian publik pada aspek tertentu sehingga mempengaruhi pandangan publik terhadap suatu peristiwa. Artinya, *framing* membuat ada aspek-aspek yang dihilangkan, disamarkan, atau ditonjolkan dalam penyampaian berita. Entman mengembangkan analisis *framing* sebagai berikut.

Tabel 1
Teknik Analisis Framing Robert N. Entman

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Sebagai apa? Atau, sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Nilai moral apa yang akan disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendealektika suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah? Jalan apa yang harus ditempuh untuk mengatasi masalah

Sumber: Entman (1993)

Dalam melakukan *framing*, tim peneliti memilih tiga media *online* di Indonesia, Kompas (<https://www.kompas.com/>), *The Jakarta Post* (<https://www.thejakartapost.com/>), dan Tempo (<https://www.tempo.co/>), masing-masing lima berita. Jenis berita yang dipilih akan berkaitan dengan topik politik, keamanan dan pertahanan, ekonomi, atau hubungan bilateral Indonesia dengan masing-masing negara. Menurut Portal 4 International Media & Newspapers (2020), ketiganya merupakan tiga surat kabar nasional Indonesia dalam jajaran 200 surat kabar papan atas dunia, dimana Kompas (ranking ke-5), Koran Tempo (ranking ke-131), dan *The Jakarta Post* (ranking ke-180). Tim peneliti menggunakan kata kunci “Indonesia Rivalitas Amerika Serikat China” dengan pembatasan waktu 2019-2020 (awal periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo).

PEMBAHASAN**Analisis *Framing*: Pemberitaan Media Massa Indonesia Mengenai Posisi Indonesia Terhadap Rivalitas Amerika Serikat dan China**

Untuk melihat pemberitaan media massa di Indonesia mengenai posisi Indonesia dalam rivalitas Amerika Serikat dan China, tim peneliti telah memilih 15 berita dari tiga media massa di Indonesia. Dari hasil analisis *framing*, tim peneliti nantinya dapat menyimpulkan bagaimana kecenderungan pemberitaan media massa di Indonesia, apakah sejalan/mendukung kebijakan luar negeri Indonesia atau sebaliknya.

Berita 1:

Peluang Indonesia Merebut Keuntungan dari Perang dagang AS-China (Kompas, 2020)

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Menurut UNCTAD, perang dagang antara China dan Amerika Serikat menguntungkan kawasan ASEAN, termasuk Indonesia. Namun, sebaliknya banyak perusahaan Amerika Serikat yang keluar dari China menjadi enggan untuk melakukan investasi di Indonesia. Padahal, seharusnya Indonesia dapat meningkatkan investasi dan ekspor dari terjadinya perang dagang.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya strategi untuk investasi asing yang jelas di Indonesia, berbeda dengan Vietnam dengan regulasi yang lebih pasti dan konsisten. • Kemampuan diplomasi menteri ekonomi Indonesia masih sangat lemah.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Perekonomian dan perdagangan bebas (terlihat dari penekanan pada upaya pertumbuhan ekonomi melalui ekspor, investasi)
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	<ul style="list-style-type: none"> • Menteri Perdagangan dan diplomat seharusnya lebih bertindak sebagai <i>opportunity seekers</i> dibanding <i>marketers</i> untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, investasi, perdagangan, turisme. • Mendorong upaya alih teknologi dan ekonomi kreatif oleh kementerian dan lembaga terkait.

	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah harus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM.
Kesimpulan	Persaingan antara Amerika Serikat dan China dapat menjadi peluang ekonomi yang positif bagi Indonesia.

Berita 2:

Hubungan AS-China Memanas, SBY Ingatkan Indonesia dan ASEAN Netral (Kompas, 2020)

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Mantan presiden RI SBY mengingatkan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk netral di tengah rivalitas Amerika Serikat-China.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat-China dapat berefek pada situasi geopolitik di kawasan Laut Cina Selatan, dimana kedua negara sudah menghadirkan kekuatan militer di Laut Cina Selatan.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip netralitas, • Prinsip ASEAN yang mengedepankan keamanan, perdamaian, dan stabilitas kawasan.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Indonesia dan negara-negara ASEAN harus menjaga stabilitas kawasan dengan cara mempertahankan sikap netral terhadap Amerika Serikat dan China.
Kesimpulan	Indonesia sebaiknya tetap netral demi menjaga stabilitas kawasan ASEAN.

Berita 3:

Indonesia Kejar Ketertinggalan Manfaatkan Perang Dagang AS-China (Kompas, 2019)

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengemukakan bahwa Indonesia masih belum optimal dalam memanfaatkan perang dagang AS-China.
---	--

<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang tidak menerima arus lonjakan FDI. Sedangkan, Vietnam telah menjadi negara tujuan menerima FDI dari China dan Hongkong, sama halnya dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina yang turut menerima FDI.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Cara berpikir oportunistik
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	<ul style="list-style-type: none"> • Aturan-aturan di Indonesia harus dipermudah, • Sistem negatif di bisnis Indonesia harus dikurangi.
Kesimpulan	Indonesia sebaiknya memanfaatkan perang dagang AS-China demi kepentingan nasional.

Berita 4:

Politik Bebas Aktif Jadi Kunci RI Bisa Kerja Sama dengan China dan AS (Kompas, 2020)

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Dengan terpilihnya Biden sebagai presiden Amerika Serikat, Indonesia memiliki peluang yang lebih luas lagi untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat maupun China, khususnya di bidang ekonomi, karena prinsip bebas aktifnya.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelumnya Amerika Serikat menuding Indonesia dekat dengan China meskipun hal tersebut tidaklah salah karena prinsip bebas aktif Indonesia. • Indonesia memiliki kepentingan sengketa Laut Cina Selatan yang berkaitan dengan Amerika Serikat. • Posisi perekonomian Indonesia dengan Amerika Serikat dan China masih lemah karena hanya menjadi pasar.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Prinsip bebas aktif
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia harus meningkatkan kemampuan negosiasinya untuk membangun kemitraan strategis dan meningkatkan kerja sama ekonomi.

	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia harus meningkatkan daya saingnya untuk berperan penting dalam tatanan perekonomian global. • Indonesia harus memperbaiki iklim usaha. • Indonesia harus berperan aktif dalam tatanan global dan dalam menghadapi persoalan-persoalan dunia yang bukan perekonomian pun.
Kesimpulan	Indonesia perlu mengembangkan kemampuan dan daya saingnya agar lebih mudah bekerjasama dengan Amerika Serikat dan China.

Berita 5:

Ditanya antara Pilih AS atau China, Begini Jawaban Presiden Jokowi (Kompas, 2020)

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Di tengah perang dagang yang menyebabkan proteksionisme dari Amerika Serikat-China, Indonesia tetap mengedepankan perekonomian yang terbuka dan penuh dengan persaingan serta kompetisi.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Indonesia memprioritaskan kepentingan nasional negara melalui prinsip bebas aktifnya dalam semua hubungan antarnegara.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip bebas aktif • Kepentingan nasional
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Hubungan Indonesia dengan negara lain harus menguntungkan bagi Indonesia dan mendukung kepentingan nasional yang ada.
Kesimpulan	Dalam menghadapi persaingan Amerika Serikat-China, Indonesia tetap mengedepankan prinsip bebas aktif dan terus mengupayakan tercapainya kepentingan nasional.

Berita 6:

Indonesia seeks US Investment in Natuna amid Growing Superpower Rivalry (The Jakarta Post, 2020)

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Selain meraih kesepakatan terkait peningkatan kerja sama di bidang keamanan di kawasan, Indonesia juga turut mengundang Amerika Serikat untuk melakukan investasi pembangunan di wilayah kepulauan Natuna Indonesia.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Hubungan Indonesia dan China sempat terganggu karena <i>coast guard</i> dan kapal penangkap ikan dari China sempat berada di ZEE Indonesia, khususnya di Laut Natuna Utara.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	UNCLOS 1982: Klaim <i>nine dash line</i> China di Laut Cina Selatan tidak sesuai hukum yang ada.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Kedaulatan maritim, khususnya di kepulauan Natuna, harus dipertahankan dengan tindakan-tindakan yang tegas.
Kesimpulan	Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dengan Amerika Serikat dan China, khususnya dalam bidang keamanan di kawasan.

Berita 7:

Indonesia to US, China: Don't Trap Us in Your Rivalry Rivalry (The Jakarta Post, 2020)

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Menteri Retno Marsudi menegur China dan AS untuk tidak melibatkan Indonesia dalam konflik perebutan pengaruh di kawasan Laut Cina Selatan.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas militer di kawasan Laut Cina Selatan telah mengalami peningkatan, terutama dari militerisasi angkatan laut China. • Terdapat kebijakan-kebijakan AS dan China di kawasan tersebut yang bermusuhan/berlawanan. • Meningkatnya resiko konflik bersenjata di kawasan.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai bebas aktif Indonesia. • Prinsip ASEAN yang mengedepankan keamanan, perdamaian, dan stabilitas kawasan.

<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia, harus tetap netral dan bersatu dalam menghadapi rivalitas AS-China di Laut Cina Selatan.
Kesimpulan	Indonesia sebaiknya tetap netral dalam menghadapi rivalitas AS-China.

Berita 8:

Indonesia's Trade Doomed without Adaptations (The Jakarta Post, 2019)

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Meski Indonesia pada awalnya cukup yakin dapat menyesuaikan diri dengan dampak dari perang dagang China-Amerika Serikat, Indonesia mengalami defisit terbesar sejak tahun 1975 pada tahun 2018.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	<ul style="list-style-type: none"> • Produk yang diekspor Indonesia ke China menjadi bahan dasar dari produk yang kemudian diekspor China ke Amerika Serikat. • Indonesia terlalu berfokus pada mitra perdagangan tradisionalnya (China salah satunya). • Indonesia terlalu berfokus pada ekspor bahan mentah. • Barang-barang yang diekspor dari Indonesia tidak ada nilai tambah.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Perekonomian (Pembahasan meliputi ekspor dan investasi).
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Indonesia harus menarik lebih banyak investasi yang mengembangkan manufaktur.
Kesimpulan	Indonesia perlu mengembangkan potensinya agar menarik lebih banyak investasi dan mitra kerja sama.

Berita 9:

US Defense Secretary to Visit Indonesia Amid Increased Tension with China (The Jakarta Post, 2020)

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Sekretaris Pertahanan AS hendak mengunjungi Indonesia untuk memperkuat kerja sama melalui penjualan persenjataan meski pada awalnya terdapat keengganan dari pihak Indonesia.
---	---

<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Dengan China yang mengganggu Laut Natuna Indonesia, maka kerja sama penjualan persenjataan menjadi alternatif terbaik.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Hukum internasional, khususnya UNCLOS.
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Negara-negara Indopasifik sebaiknya memperluas hubungan keamanan kawasannya dengan mitra-mitra yang sama kepentingan.
Kesimpulan	Indonesia dan negara di kawasan Indopasifik perlu memperkuat kerja sama keamanan.

Berita 10:

RI Pledges Neutrality during Pompeo Visit (The Jakarta Post, 2020)

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Di tengah rivalitas antara China-Amerika Serikat, Indonesia memutuskan untuk menjaga netralitas terlepas dari kunjungan Mike Pompeo ke Indonesia.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Dengan klaim China di Laut Natuna Utara yang menjadi bagian dari ZEE Indonesia, Indonesia akan memperjuangkan kedaulatan maritimnya, salah satu caranya dengan bekerja sama dengan Amerika Serikat. Namun, Indonesia tetap tidak ingin terlibat dalam sengketa pengaruh di kawasan antara Amerika Serikat-China.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip bebas aktif • HAM • UNCLOS
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Seluruh negara perlu melaksanakan kerja sama yang inklusif dan berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran dunia.
Kesimpulan	Indonesia menjaga netralitasnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian.

Berita 11:

Perang Dagang AS-Cina, ADB: Indonesia Tertinggal Ambil Peluang (Tempo, 2019)

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Indonesia tidak mendapatkan manfaat dari perang dagang Amerika Serikat-China
---	--

	dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global masih belum besar.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Perekonomian dan perdagangan bebas (terlihat dari penekanan pada rantai nilai global, ekspor, investasi)
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun penguatan kerja sama antar industri dalam negeri yang membantu ekspansi dan inovasi perusahaan. • Investasi dan pembangunan infrastruktur • Mempertimbangkan kebijakan ketenagakerjaan yang mendorong tenaga kerja di sektor pertanian memasuki sektor lain. • Mengembangkan kemampuan inovasi dengan menarik investasi asing.
Kesimpulan	Indonesia perlu meningkatkan daya saing, pembangunan, dan menguatkan kerja sama dengan negara lainnya agar mendapatkan manfaat dari persaingan Amerika Serikat-China.

Berita 12:

RI-Cina Mesra, AS Tetap Anggap Indonesia Mitra Penting (Tempo, 2019)

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Dengan menguatnya hubungan antara Indonesia-China dari program BRI, Amerika Serikat membuka kesempatan untuk Indonesia menjalankan hubungan Amerika Serikat sebagai mitranya, dari sektor energi, pendidikan, hingga sosial.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	<ul style="list-style-type: none"> • Perang dagang Amerika Serikat-China. • Kelayakan pembangunan, kualitas lingkungan, dan kemampuan Indonesia untuk membayar pinjaman terhadap China dipertanyakan oleh Amerika Serikat. • Sementara itu, Amerika Serikat memiliki kemampuan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan standar G20.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Pembangunan yang berkelanjutan (terlihat dari bagaimana Amerika Serikat mempertanyakan kualitas pembangunan

	yang dilakukan China dan sebaliknya mengangkat pembangunan Amerika Serikat yang lebih berkualitas).
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Indonesia tidak harus memutus hubungan dengan China, namun Indonesia harus mempertimbangkan pilihan mitra kerja sama lainnya.
Kesimpulan	Indonesia perlu memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat, China, dan negara-negara lainnya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di dalam negeri.

Berita 13:

Mike Pompeo Dukung Indonesia Tolak Klaim Cina di Laut Cina Selatan (Tempo, 2020)

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Amerika Serikat mendukung Indonesia yang menegaskan kedaulatannya di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat juga turut terbuka untuk mengadakan kerja sama lebih lanjut bersama Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Laut Cina Selatan.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	China semakin agresif di Laut Cina Selatan: <ul style="list-style-type: none"> • China mengklaim Laut Natuna Utara • China menerobos ZEE Indonesia di Laut Natuna • Mempersenjatai pulau Spratley dan Paracel dengan perlengkapan militer • Rutin berpatroli di Laut Cina Selatan sebagai bentuk intimidasi • Insiden <i>West Capella</i>: China mengganggu pengeboran lepas laut Malaysia • China sempat menenggelamkan kapal Vietnam di Paracel
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	UNCLOS 1982
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Indonesia harus tetap mengacu pada UNCLOS 1982 dan terus mempertahankan stabilitas dan perdamaian kawasan. Terlebih, Indonesia harus terus menjaga kedaulatan maritimnya di Laut Natuna Utara.
Kesimpulan	Indonesia harus mempertahankan stabilitas dan perdamaian di kawasan, sekaligus menjaga kedaulatan maritimnya.

Berita 14:

BI Ingatkan Tantangan Ekonomi Indonesia 2019 dari Cina dan AS (Tempo, 2019)

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Munculnya ancaman dalam kondisi ekonomi global bagi Indonesia, khususnya dari sisi perdagangan.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	<ul style="list-style-type: none"> • Amerika Serikat dan China sedang mengalami ancaman dalam ekonominya dan hal tersebut berpengaruh terhadap Indonesia. • Ekspor Indonesia terhadap Amerika Serikat akan melemah. • Ekspor komoditas Indonesia terhadap China yang merupakan pasar terbesarnya turut terhalangi.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Perekonomian dan perdagangan (Pembahasan meliputi kondisi ekonomi global, ekspor, investasi)
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia harus memanfaatkan kemungkinan relokasi industri dari China sehingga dapat mendatangkan investasi ke Indonesia. • Indonesia harus mencari pasar baru ke Asia Selatan agar Indonesia memiliki pasar-pasar baru terlepas dari Amerika Serikat-China.
Kesimpulan	Dalam menghadapi ancaman global, Indonesia harus mencari pasar baru selain Amerika Serikat dan China.

Berita 15:

Soal Natuna, Ekonom Sarankan RI Tak Balas Cina dengan Aksi Dagang (Tempo, 2020)

<i>Define Problems</i> (Pendefinisian masalah)	Ekonom dari UI menyarankan Indonesia untuk tidak melakukan retaliasi terhadap China di bidang perdagangan sebab klaim China di Laut Natuna.
<i>Diagnose Causes</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	<ul style="list-style-type: none"> • China merupakan mitra perdagangan terbesar Indonesia dan Indonesia masih memiliki posisi dagang yang defisit terhadap China, sehingga China dapat membalas Indonesia lebih parah lagi apabila Indonesia melakukan retaliasi.

	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelumnya, pemerintah menerima saran untuk memberlakukan aksi diplomatik yang lebih keras terhadap China, bahkan di bidang ekonomi.
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat keputusan moral)	Perekonomian (Penekanan pada pentingnya menjaga perekonomian dengan menjaga hubungan perdagangan).
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan penyelesaian)	Permasalahan politik sebaiknya tidak melebar dan mempengaruhi perekonomian.
Kesimpulan	China masih menjadi mitra ekonomi yang penting bagi Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia perlu menjaga hubungan baik dengan China.

Berdasarkan analisis *framing* yang telah dilakukan, tim peneliti menyimpulkan tiga pesan utama yang disampaikan oleh Kompas, *The Jakarta Post*, dan Tempo. Pertama, Indonesia sebaiknya tidak memihak kepada Amerika Serikat ataupun China. Pesan tersebut disampaikan oleh berita 2, 5, 7, 10, dan 13. Dalam berita-berita tersebut ditegaskan bahwa ketidakberpihakan Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip yang berlaku secara nasional dan global. Prinsip utama yang ditekankan oleh media adalah politik luar negeri bebas aktif yang diterapkan oleh Indonesia sejak dulu. Dalam prinsip politik luar negeri bebas aktif disebutkan bahwa pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia sebaiknya tidak berpihak atau terikat pada kekuatan tertentu. Di sisi lain, menurut UU RI NOMOR 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Indonesia perlu berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian sengketa, konflik, ataupun permasalahan global lainnya, sehingga terwujud perdamaian dan ketertiban dunia. Selain itu, netralitas Indonesia pun berkaitan dengan prinsip yang disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN. Setiap negara anggota diminta untuk tidak memihak pada kekuatan atau dominasi negara manapun. Negara anggota ASEAN pun perlu bekerjasama untuk membangun kesatuan dan persatuan di kawasan. Terakhir, Indonesia pun terikat pada *United Nations Convention on The Law of the Sea* (UNCLOS) yang menekankan pada pentingnya kerja sama dan solidaritas antarnegara untuk memelihara perdamaian, keadilan dan

kemajuan secara global. Berdasarkan penjelasan tersebut, tim peneliti pun menyimpulkan bahwa berita-berita terpilih (berita 2, 5, 7, 10, dan 13) mendukung kebijakan luar negeri Indonesia terkait rivalitas Amerika Serikat dan China.

Pesan kedua yang disampaikan adalah pentingnya menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan China. Pesan tersebut disampaikan oleh berita 1, 6, 9, 12, 14, dan 15. Hasil analisis *framing* dari keenam berita menjelaskan bahwa Amerika Serikat dan China masih menjadi mitra potensial bagi Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia perlu meningkatkan kerja sama dengan Amerika Serikat dan China dalam berbagai bidang, mulai dari keamanan, energi, pendidikan, sosial hingga investasi pembangunan. Keberadaan kedua negara masih diperlukan karena Indonesia masih memerlukan bantuan dalam rangka memenuhi kepentingan nasional. Lebih lanjut, kerja sama pun perlu dikembangkan dengan negara mitra lainnya, mengingat dampak yang bisa saja dihasilkan dari persaingan Amerika Serikat dan China. Pesan yang disampaikan oleh kalimat berita itu pun sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Sejak awal, Indonesia telah menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat melalui *Strategic Partnership*. Sementara itu, Indonesia pun memperkuat kemitraannya dengan China melalui *Comprehensive Strategic Partnership*. Jika melihat data, hubungan Indonesia dengan kedua negara semakin kuat dari tahun ke tahun. Tidak hanya itu, kedua negara yang sedang bersaing ini pun dilibatkan dalam kerangka kerja sama multilateral, seperti ASEAN dan Indo-Pasifik. Dengan begitu, Indonesia tetap menjaga netralitasnya, namun tidak akan kehilangan mitra kuatnya.

Selain itu, penguatan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan China sejalan pula dengan 4+1 Prioritas Politik Luar Negeri Indonesia, khususnya prioritas pertama, yaitu penguatan diplomasi ekonomi. Dalam *Media Briefing Penyampaian Prioritas Politik Luar Negeri Republik Indonesia 2019-2024*, Menteri Luar Negeri menyatakan bahwa kerja sama dan perjanjian bilateral menjadi salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan untuk memperkuat perekonomian Indonesia (Kemlu RI, 2019).

Secara khusus, hubungan bilateral Indonesia dan Amerika Serikat semakin diperkuat melalui 1st Meeting of Strategic Dialogue pada Agustus 2021. Pada kesempatan tersebut, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat memperkuat dan memperluas kerja sama dalam bidang ekonomi, kesehatan, perubahan iklim, hingga isu kawasan dan internasional lainnya (Kemlu RI, 2021). Kolaborasi Indonesia dan China di bidang perekonomian, kesehatan, kerja sama regional dan global pun terus diperkuat melalui penandatanganan sejumlah dokumen kerja sama (Kemlu RI, 2021). Berdasarkan penjelasan yang ada, tim peneliti pun menyimpulkan pesan media mengenai penguatan kerja sama dengan Amerika Serikat dan China sejalan dengan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.

Terakhir, berita 3, 4, 8, dan 11 menegaskan bahwa Indonesia perlu memperkuat potensi dalam negeri, khususnya dalam bidang investasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Menurut keempat berita tersebut, persaingan Amerika Serikat dan China sebenarnya bisa menjadi peluang ekonomi yang positif bagi Indonesia dan negara-negara lainnya. Oleh sebab itu, Indonesia perlu meningkatkan potensinya agar tidak kalah saing dengan negara-negara lain. Berdasarkan data, negara-negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Vietnam menerima keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. Selain itu, negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara pun dinilai lebih menarik perhatian para investor dibandingkan Indonesia (Kompas, 2019). Secara khusus, Indonesia perlu membenahi regulasi, pasar, hingga iklim usaha agar menarik perhatian lebih banyak investor dari Amerika Serikat dan China. Hal-hal lainnya seperti kualitas sumber daya manusia pun perlu menjadi perhatian demi meningkatkan *leverage* Indonesia di mata internasional.

Pesan yang disampaikan oleh keempat berita di atas sejalan pula dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Berdasarkan Renstra Kemlu RI 2020-2024, pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional. Oleh sebab itu, pemerintah pun menerapkan 'Diplomasi untuk Rakyat, Diplomasi Membumi' dimana setiap aktivitas diplomasi Indonesia akan selalu 'dekat' dengan kepentingan rakyat.

Selain itu, pesan tersebut selaras pula dengan Prioritas Kerja Presiden 2019-2024. Dalam pidato pelantikannya (Setneg, 2019), Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa tugas pemerintah adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas infrastruktur dan mendongkrak lapangan kerja baru. Pemerintah juga akan melakukan penyederhanaan regulasi dan birokrasi. APBN pun akan dipastikan tepat sasaran sehingga dapat menyejahterakan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan tiga pesan utama yang disampaikan oleh berita-berita terpilih, tim peneliti pun menyimpulkan bahwa media massa di Indonesia mendukung keputusan pemerintah untuk tidak berpihak pada Amerika Serikat atau China. Sebaliknya, pemerintah sebaiknya tetap fokus pada upaya pencapaian kepentingan nasional dengan cara meningkatkan potensi dan kualitas dalam negeri. Tiga media massa (*Kompas*, *The Jakarta Post*, dan *Tempo*) pun berupaya untuk menyampaikan kepada masyarakat, baik dalam maupun luar negeri, bahwa keputusan Indonesia untuk tidak memihak kepada siapapun merupakan cara terbaik dalam rangka menjaga keamanan dan perdamaian.

Jika dikaitkan dengan fungsi dan peranan media massa (Graber dan Suwardi), ketiga media massa ini pun telah menjalankannya dengan baik. *Kompas*, *The Jakarta Post*, dan *Tempo* membantu pemerintah untuk menyebarluaskan informasi mengenai posisi Indonesia dalam rivalitas Amerika Serikat dan China. Kemudian, ketiga media massa pun menjadikan kebijakan luar negeri Indonesia sebagai agenda publik dengan sudut pandang yang sejalan dengan pemerintah. Masyarakat pun menunjukkan dukungannya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari minimnya opini masyarakat yang menolak keputusan Indonesia untuk tetap menjaga netralitasnya. Dapat disimpulkan, media massa di Indonesia menunjukkan dukungannya terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait rivalitas Amerika Serikat dan China.

KESIMPULAN

Setiap negara memiliki keputusan dan tindakan yang berbeda dalam menanggapi rivalitas Amerika Serikat dan China. Melalui pernyataan Presiden dan Menteri Luar Negeri, Indonesia tetap mempertahankan netralitasnya dengan tujuan menjaga kestabilan keamanan dan perdamaian. Media massa, sebagai salah satu aktor yang berperan dalam menginformasikan dan mengadvokasi publik, ikut mendukung sikap dan keputusan Indonesia. Media massa pun memiliki kemampuan dalam membentuk opini masyarakat, baik di dalam ataupun luar negeri, menggunakan *agenda setting* dan *framing*. Dari sejumlah berita yang telah dipilih, media massa ikut menegaskan bahwa pemerintah sebaiknya tidak berpihak kepada salah satu pihak karena Amerika Serikat dan China masih menjadi mitra penting bagi Indonesia. Berita-berita di media massa pun menyampaikan beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah, antara lain mengembangkan potensi dalam negeri, mencari mitra-mitra baru, dan tetap fokus mengejar kepentingan nasional. Artinya, dengan kemampuan *agenda setting* dan *framing* yang dimilikinya, media massa di Indonesia memilih untuk mendukung kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi persaingan Amerika Serikat dan China.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, R. (2019). *Indonesia's Trade Doomed Without Adaptations*. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/01/21/ri-trade-doomed-without-adaptations.html>
- Ajjan, M. dan Begum, S.M (2021). Do the Media Affect the Decisions of Policy Makers in Foreign Policy? *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 12 (6), 11-17. <https://doi.org/10.36941/mjss-2021-0052>
- Akbar, C. (2020). *Soal Natuna, Ekonom Sarankan RI Tak Balas Cina dengan Aksi Dagang*. <https://bisnis.tempo.co/read/1291364/soal-natuna-ekonom-sarankan-ri-tak-balas-cina-dengan-aksi-dagang>
- Allard, T. dan Widiyanto, S. (2020). *Indonesia to U.S., China: Don't trap us in your rivalry*. <https://www.reuters.com/article/us-indonesia-politics-foreign-minister-idUSKBN25Z1ZD>
- Allard, T. dan Widiyanto, S. (2020). *Indonesia to US, China: Don't Trap us in your Rivalry*.

<https://www.thejakartapost.com/news/2020/09/09/indonesia-to-us-china-dont-trap-us-in-your-rivalry.html>

Amstutz, M.R. (1998). *International Conflict and Cooperation: An Introduction to World Politics*, McGraw Hill.

Aulia, L. (2020). *Politik Bebas Aktif Jadi Kunci RI Bisa Kerja Sama dengan China dan AS*.
<https://www.kompas.id/baca/internasional/2020/12/02/politik-bebas-aktif-jadi-kunci-ri-bisa-kerja-sama-dengan-china-dan-as>

Bowen, G.A. (2009), "Document Analysis as a Qualitative Research Method", *Qualitative Research Journal*, Vol. 9. h. 27-40.\

Brecher, M. A Framework for Research on Foreign Policy Behavior. *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 13 No. 1, <http://www.jstor.org/stable/173299>.

Cahyani, D.R. (2019). *BI Ingatkan Tantangan Ekonomi Indonesia 2019 dari Cina dan AS*. <https://bisnis.tempo.co/read/1181670/bi-ingatkan-tantangan-ekonomi-indonesia-2019-dari-cina-dan-as/full&view=ok>

Centre for Innovation Policy & Governance (2012). *Tentang Media dan Demokrasi*. <http://cipg.or.id/wp-content/uploads/2015/05/CREAME-4.-Media-Demokrasi-2012.pdf>

Creswell, J.W. (2008), *Educational Research*. Pearson/Merrill Prentice Hall.

Entman, R.N. (1993). *Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm*.

Graber, D.A. (1984). *Mass Media and American Politics*. CQ Press.

Hamad, I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa: Sebuah Studi Critical Analysis Discourses Terhadap Berita-Berita Politik*. Jakarta: Granit.

Iskandar, R., Ambarwati, & Putra, M.I.T., (2022). Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Belt and Road Initiative. *Jurnal Dinamika Global*, 7(1), 84-105.
<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/961/333>

Jafar, M. (2020). *Peluang Indonesia Merebut Keuntungan dari Perang Dagang AS-China*.
<https://money.kompas.com/read/2020/06/30/134234426/peluang-indonesia-merebut-keuntungan-dari-perang-dagang-as-china?page=all>

Kementerian Luar Negeri RI (2019). *Indonesian FM: Year 2020 is an Important Momentum for Strengthening the Comprehensive Strategic Partnership between Indonesia and China*.
<https://kemlu.go.id/portal/en/read/901/berita/indonesian-fm-year->

[2020-is-an-important-momentum-for-strengthening-the-comprehensive-strategic-partnership-between-indonesia-and-china.](#)

Kementerian Luar Negeri RI (2019). Penyampaian Prioritas Politik Luar Negeri Republik Indonesia 2019-2024.

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/725/pidato/penyampaian-prioritas-politik-luar-negeri-republik-indonesia-2019-2024#>

Kementerian Luar Negeri RI (2020). Lima Prioritas Kerja Presiden Jokowi-Wapres Ma'ruf, 2019-2024.

[https://kemlu.go.id/hochiminhcity/id/news/4510/lima-prioritas-kerja-presiden-jokowi-wapres-maruf-2019-2024.](https://kemlu.go.id/hochiminhcity/id/news/4510/lima-prioritas-kerja-presiden-jokowi-wapres-maruf-2019-2024)

Kementerian Luar Negeri RI (2021). *Indonesia dan Tiongkok Sepakat Perkuat Kolaborasi untuk Dorong Pemulihan Ekonomi dan Tangkal Pandemi.*

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/2069/berita/indonesia-dan-tiongkok-sepakat-perkuat-kolaborasi-untuk-dorong-pemulihan-ekonomi-dan-tangkal-pandemi>

Kementerian Luar Negeri RI (2021). *Indonesia-AS lakukan Dialog Strategis Pertama.*

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/2768/berita/indonesia-as-lakukan-dialog-strategis-pertama>

Kementerian Luar Negeri RI. Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat.

https://kemlu.go.id/washington/id/pages/hubungan_bilateral/554/etc-menu

Kementerian Luar Negeri RI. Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri tahun 2020.

<https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJlZCUyMERvY3VtZW50cy8xJTlwcHB0bTlwMjAucGRm>

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia. 5 Prioritas Kerja Presiden 2019 - 2024.

<https://www.menpan.go.id/site/tentang-kami/tentang-kami/5-prioritas-kerja-presiden-2019-2024>

Kurniawan, A.B. (2020). "Kompas" Ranking Ke-5 Surat Kabar Dunia.

<https://www.kompas.id/baca/dikbud/2020/05/22/kompas-ranking-ke-5-surat-kabar-dunia>

McCombs, M dan Reynolds, A (2002). "News influence on our pictures of the world". *Media Effects: Advances in Theory and Research*.

McCombs, M. dan Shaw, D.L. The Agenda-Setting Role of the Mass Media in the Shaping of Public Opinion,

https://www.infoamerica.org/documentos_pdf/mccombs01.pdf

Naveh, C (2002). The Role of the Media in Foreign Policy Decision-Making: A Theoretical Framework. *Conflict & Communication Online*, 1(2),

https://regener-online.de/journalcco/2002_2/pdf_2002_2/naveh.pdf

- Nur Hakim, R. (2019). *Indonesia Kejar Ketertinggalan Manfaatkan Perang Dagang AS-China*.
<https://nasional.kompas.com/read/2019/10/08/22583541/indonesia-kejar-ketertinggalan-manfaatkan-perang-dagang-as-china?page=all>
- Oktavianti, T.I. (2020). *Indonesia seeks US Investment in Natuna Amid Growing Superpower Rivalry*.
<https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/29/indonesia-seeks-us-investment-in-natuna-amid-growing-superpower-rivalry.html>
- Prabowo, D. (2020). *Hubungan AS-China Memanas, SBY Ingatkan Indonesia dan ASEAN Netral*.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/12/10060571/hubungan-as-china-memanas-sby-ingatkan-indonesia-dan-asean-netral>
- Pramadiba, I.M. (2020). *Mike Pompeo Dukung Indonesia Tolak Klaim Cina di Laut Cina Selatan*. <https://dunia.tempo.co/read/1400536/mike-pompeo-dukung-indonesia-tolak-klaim-cina-di-laut-cina-selatan/full&view=ok>
- Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2020-2024.
- Retnachrista RS (2007). Peran News Corporations dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Menginvasi Irak (Maret 2003). *Global & Strategis*. 1(2), 138-150. <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-global05%20retnachrista.pdf>
- Sari, S. & Yani, Y.M. (2017). Revitalisasi Hubungan Amerika Serikat di Asia Pasifik. *Jurnal Dinamika Global*, 2(2017), 4-17. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/35/22>
- Seknas (2014). *Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian: Visi, Misi, dan Program Aksi Jokowi-Jusuf Kalla 2014*. Jakarta: Seknas Jokowi.
- Septiari, D. (2020). *RI Pledges Neutrality during Pompeo Visit*.
<https://www.thejakartapost.com/news/2020/10/29/ri-pledges-neutrality-during-pompeo-visit.html>
- Septiari, D. (2020). *US Defense Secretary to Visit Indonesia Amid Increased Tension with China*.
<https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/23/us-defense-secretary-to-visit-indonesia-amid-increased-tension-with-china.html>
- Setiawan, A (2019). Peran Media Massa dalam Politik Luar Negeri: Kasus di Indonesia. *Jurnal Mandala* 2(1).
- Setiawan, A. (2015). *Indonesia's Foreign Policy Priorities in 5 Years Ahead*.
<http://setkab.go.id/en/indonesias-foreign-policy-priorities-in-5-years-ahead/>

Setneg RI (2019). *SDM Unggul Menjadi Prioritas Utama Jokowi*. https://www.setneg.go.id/baca/index/sdm_unggul_menjadi_prioritas_utama_jokowi

Tri, R. (2019). *RI-Cina Mesra, AS Tetap Anggap Indonesia Mitra Penting*. <https://bisnis.tempo.co/read/1268623/ri-cina-mesra-as-tetapanggap-indonesia-mitra-penting/full&view=ok>

Utomo, A.P. (2020). *Ditanya antara Pilih AS atau China, Begini Jawaban Presiden Jokowi*. <https://internasional.kompas.com/read/2020/02/14/09362311/ditanya-antara-pilih-as-atau-china-begini-jawaban-presiden-jokowi?page=all>

UU RI NOMOR 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Widyastuti, A.Y. (2019). *Perang Dagang AS-Cina, ADB: Indonesia Tertinggal Ambil Peluang*. <https://bisnis.tempo.co/read/1266851/perang-dagang-as-cina-adb-indonesia-tertinggal-ambil-peluang/full&view=ok>